

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan, dengan studi kasus pembinaan Tari Topeng Betawi di Kota Bekasi, disimpulkan belum berjalan efektif karena adanya disfungsi pada hampir seluruh variabel Model Van Meter dan Van Horn. Secara normatif, Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki dasar regulatif melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023; namun, efektivitas terhambat oleh ketidakjelasan standar dan tujuan kebijakan (1), yang mana standar operasional teknis pembinaan tidak baku dan indikator keberhasilan tidak terukur. Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya (2), yang ditandai oleh minimnya anggaran, fasilitas, dan SDM, yang memaksa pemerintah bergantung pada pihak swasta dan mengakibatkan sanggar mengandalkan regenerasi internal. Di sisi komunikasi (3), pola interaksi terbukti tidak merata dan terstruktur, menyebabkan bias informasi yang menghambat partisipasi sanggar kecil (seperti kasus Sanggar Trisna Manggala). Walaupun Karakteristik Agen Pelaksana (4) menunjukkan komitmen struktural, Disposisi Pelaksana (5) belum konsisten; komitmen kuat pelaku seni berbanding terbalik dengan keterbatasan dukungan operasional menyeluruh dari pemerintah. Terakhir, implementasi sangat dipengaruhi oleh Kondisi Lingkungan Eksternal (6), yaitu rendahnya minat generasi muda, perubahan preferensi sosial-budaya, dan minimnya dukungan struktural dari institusi pendidikan. Secara kolektif, keenam variabel tersebut menciptakan kesenjangan implementasi yang signifikan: meskipun pelaku seni memiliki komitmen tinggi untuk melestarikan, kebijakan pemerintah gagal menyediakan kerangka teknis, sumber daya merata, dan mekanisme komunikasi yang memadai, sehingga tujuan pemajuan kebudayaan belum tercapai secara optimal dan merata di Kota Bekasi. Secara kolektif, variabel-variabel tersebut menciptakan kesenjangan implementasi yang signifikan: meskipun pelaku seni memiliki komitmen tinggi untuk melestarikan, kebijakan

pemerintah gagal menyediakan kerangka teknis, sumber daya merata, dan mekanisme komunikasi yang memadai, sehingga tujuan pemajuan kebudayaan belum tercapai secara optimal dan merata di Kota Bekasi.

5.2 Saran

Untuk mencapai efektivitas, konsistensi, dan pemerataan implementasi kebijakan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kota Bekasi direkomendasikan untuk melakukan revitalisasi kebijakan dengan fokus pada sembilan aspek kunci berikut:

1. Penguatan Standar dan Sumber Daya Penyusunan SOP Pembinaan Teknis: Pemerintah wajib merumuskan Standar Operasional Teknis (SOP) Pembinaan Tari Topeng Betawi yang detail dan terukur. SOP ini harus mencakup indikator keberhasilan yang baku, standar kurikulum, kriteria pelatih, serta prosedur evaluasi berkala untuk meminimalisir multitafsir. Alokasi Anggaran Proporsional: Diperlukan peningkatan porsi anggaran secara berkelanjutan untuk seni tradisional. Langkah ini harus disertai dengan penyediaan dana operasional khusus bagi sanggar aktif dan pengembangan skema pendanaan alternatif (CSR/BUMN/BUMD) guna mengurangi ketergantungan fiskal. Penyediaan Fasilitas Merata: Pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang layak dan merata berbasis wilayah, termasuk ruang latihan khusus dan memfasilitasi peminjaman alat kesenian untuk meningkatkan kualitas pembinaan.
2. Perbaikan Tata Kelola dan Komunikasi Perbaikan Sistem Pendataan dan Komunikasi: Dinas harus melakukan pemutakhiran data dan verifikasi legalitas seluruh sanggar secara berkala untuk mencegah ketimpangan akses program. Sistem komunikasi juga harus didigitalisasi (database, kanal resmi) untuk menjamin informasi program tersalurkan secara adil dan transparan kepada semua sanggar. Penguatan Kapasitas SDM Pelaksana: Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi pelatih dan pengelola sanggar melalui pelatihan

manajemen, workshop teknik tari, dan program sertifikasi untuk menjamin pembinaan berjalan sesuai standar profesional.

3. Orientasi Program dan Integrasi Integrasi ke Sistem Pendidikan: Pemerintah didorong untuk menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan Tari Topeng Betawi ke dalam muatan lokal atau ekstrakurikuler, sebagai upaya strategis memperkuat minat dan mempercepat regenerasi pelaku seni. Pengembangan Model Berkelanjutan: Pendekatan pembinaan harus diubah dari model yang berorientasi event semata menjadi pembinaan jangka panjang dengan pendampingan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi berbasis indikator kualitas, bukan hanya jumlah acara. Pendorongan Kolaborasi Multi-Pihak: Pemerintah harus memperkuat kerja sama dengan komunitas, lembaga pendidikan, event organizer, dan sektor swasta untuk membuka ruang baru bagi pertunjukan, promosi, dan pemberdayaan sanggar. Evaluasi dan Pengawasan: Perlu dilakukan evaluasi implementasi kebijakan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui audit program tahunan, rapat evaluasi bersama sanggar, dan peninjauan ulang regulasi jika diperlukan, agar kebijakan selalu adaptif terhadap perkembangan sosial budaya. Secara keseluruhan, pemerintah perlu melakukan revitalisasi kebijakan pembinaan budaya melalui peningkatan standar teknis, optimalisasi sumber daya, perbaikan komunikasi, dan pembangunan infrastruktur. Dengan memperkuat seluruh indikator tersebut, implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan, sehingga tujuan pelestarian Tari Topeng Betawi di Kota Bekasi dapat tercapai secara optimal.